



IMPLIKASI PENDIDIKAN ISLAM MENURUT SKB 3 MENTERI DALAM MENUMBUHKAN KARAKTER MODERAT

Dwi Intan Febriyanti Ilyas

Universitas Singaperbangsa Karawang

Jamilah Qiyaafatul Haq

Universitas Singaperbangsa Karawang

Junia Nawangsih

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abdul Azis

Universitas Singaperbangsa Karawang

Alamat: Jl. HS. Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Karawang 41363

Email: 2210631110107@student.unsika.ac.id

Abstract. *The Joint Decree (SKB) Policy of 3 Ministers in 1975 involving the ministers of religion, education and home affairs has become the basis for structural reform of madrasahs by including curricula for religious and general education. The purpose of this study is to analyze the implications of the SKB 3 ministers policy on Islamic education in relation to the growth of students' moderate character by integrating the values of tolerance, anti-toxicity and nationality. The research method uses a descriptive qualitative approach for the type of library research. Data collection techniques include analysis of ministerial documents of the SKB 3 ministers, education archives, and literature related to religious moderation. Data analysis was carried out by triangulation of sources and critical discourse analysis to determine the effectiveness of guidelines on Islamic education practices. The research findings indicate that the SKB 3 Ministers has implications for: (1) strengthening madrasah facilities as an integral part of the national education system, (2) integrating religious moderation values into Islamic education curricula, and (3) increasing the recognition of madrasah diplomas for educational equality. The challenges of implementation lie in the resistance of conservative groups and inconsistencies in policies at the regional level. The conclusion of this study confirms that the Ministerial Decree 3 not only reforms the administrative aspect, but also becomes a strategic tool to build moderate character based on local wisdom and nationalism.*

Keywords: *Implications, Islamic Education, Ministerial Decree 3, moderate character*

Abstrak. Kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tahun 1975 yang melibatkan menteri agama, pendidikan dan dalam negeri telah menjadi dasar untuk reformasi struktural madrasah dengan menyertakan kurikulum untuk pendidikan agama dan umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi kebijakan SKB 3 menteri pada pendidikan Islam sehubungan dengan pertumbuhan karakter moderat

siswa dengan mengintegrasikan nilai-nilai toleransi, anti-toksisitas dan kebangsaan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk jenis penelitian perpustakaan. Teknik pengumpulan data meliputi analisis dokumen menteri SKB 3 menteri, arsip pendidikan, dan literatur yang terkait dengan moderasi agama. Analisis data dilakukan dengan triangulasi sumber dan analisis wacana kritis untuk menentukan efektivitas pedoman pada praktik pendidikan Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa SKB 3 Menteri berimplikasi pada: (1) memperkuat fasilitas madrasah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, (2) nilai-nilai moderasi beragama diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan Islam, dan (3) meningkatkan pengakuan ijazah madrasah untuk kesetaraan pendidikan. Tantangan implementasi terletak pada perlawanan kelompok konservatif dan inkonsistensi kebijakan ditingkat daerah. Kesimpulan dari penelitian ini mengkonfirmasi bahwa Menteri SKB 3 tidak hanya mereformasi aspek administrasi, tetapi juga menjadi alat strategis untuk membangun karakter moderat berdasarkan kearifan lokal dan nasionalisme.

Kata kunci: Implikasi, Pendidikan Islam, SKB 3 Menteri, karakter moderat.

LATAR BELAKANG

Pendidikan di Indonesia berlangsung sejalan dengan dinamika politik yang ada. Sejarah perjalanan bangsa kita mencakup tiga fase penting yaitu Orde Lama (1945-1965), Orde Baru (1965-1998), dan Orde Reformasi (1998-sekarang). Kebijakan Pendidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang berkuasa. Pendidikan mencerminkan pola kehidupan Masyarakat dan system budaya yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, perubahan dalam system kekuasaan sering kali diikuti oleh perubahan substansial dalam bidang Pendidikan. Sejak zaman prasejarah, melalui zaman kuno dan menengah, hingga memasuki era modern, Pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dinamis, terutama pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto (Zuhairini, 1992).

Salah satu tokoh yang berpengaruh dalam perbaikan Pendidikan di Indonesia adalah A. Mukti Ali. Selama menjabat sebagai Menteri Agama, beliau berhasil memberikan kontribusi yang signifikan terhadap dunia Pendidikan, khususnya dalam bidang Pendidikan Islam (Abudin Nata, 2011).

Banyak kebijakan di bidang Pendidikan Islam yang dikeluarkan selama masa jabatan sebagai Menteri Agama. Salah satunya pencapaian yang signifikan adalah lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri, yang lebih dikenal dengan sebutan SKB tiga Menteri (Abudin Nata, 2011).

Pendidikan Islam moderat di Indonesia mengedepankan dua pendekatan, yaitu integratif dan komprehensif. Pendekatan ini memanfaatkan beragam materi yang saling terhubung antara satu tema dengan tema lainnya. Tujuan Pendidikan adalah untuk membentuk pikiran, sikap, dan keterampilan. Dengan kata lain, keberhasilan Pendidikan dapat diukur melalui perubahan yang

terjadi secara kognitif, afektif, dan psikomototik. Ketiga aspek ini sebaiknya dicapai melalui cara yang integratif dan komprehensif (Ahmad&Afan, 2015).

Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan keberagaman, terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan Bahasa. Secara geografis, Indonesia terbentang di atas kepulauan yang masing-masing menyimpan kekayaan budaya dan kearifan local yang unik. Keberagaman ini menjadikan Masyarakat Indonesia bersifat majemuk dan multivariant. Oleh karena itu, salah satu cara efektif untuk mencegah perpecahan, sikap egosentris, paham primordialisme, serta potensi munculnya radikalisme adalah dengan mengedepankan perilaku moderat. Dengan demikian, lulusan Pendidikan yang berlandaskan moderasi beragama diharapkan dapat menerima keberagaman, menghargai keyakinan orang lain, serta mengedepankan toleransi dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Muaz&Uus, 2022).

Artikel “SKB 3 Menteri dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam” oleh Salman Alfarisi dan Yunus Abu Bakar membahas dampak kebijakan SKB 3 Menteri terhadap Pendidikan agama Islam, khususnya madrasah, dengan pendekatan historis dan structural. Penulis menyoroti bagaimana pengaruh SKB terhadap kelembagaan madrasah dari segi administratif, legalitas, dan pengakuan dalam system Pendidikan nasional, serta tantangan dan dampak positifnya. Sementara itu, penelitian kami berjudul “Implikasi Pendidikan Islam Menurut SKB 3 Menteri dalam Menumbuhkan Karakter Moderat” berfokus pada peran Pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter moderat, menggunakan SKB 3 Menteri sebagai pijakan normative. Penulis menekankan potensi Pendidikan Islam dalam menanamkan nilai moderasi, toleransi, dan keberagaman, serta mengeksplorasi penyesuaian kurikulum dan metode pengajaran untuk memperkuat semangat moderasi dalam Masyarakat plural.

Kedua artikel ini memiliki fokus yang berbeda namun saling mendukung. Artikel pertama lebih menyoroti aspek structural dan kebijakan kelembagaan dalam Pendidikan agama Islam, sementara artikel kedua lebih menekankan pada nilai dan karakter yang ingin dibentuk melalui Pendidikan Islam dalam konteks kebijakan tersebut. Perbedaan perspektif ini menjadi penting sebagai dasar teoretis untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana SKB 3 Menteri dapat dioptimalkan guna memperkuat Pendidikan Islam yang inklusif dan moderat di Indonesia (Alfarisi&Bakar, 2022).

Artikel “Pendidikan Islam Moderat dalam Menumbuhkan Karakter Religius dan Kebangsaan di Sekolah Menengah Pertama” membahas pelaksanaan Pendidikan Islam moderat di SMP untuk menumbuhkan pendekatan kualitatif dan menunjukkan bahwa nilai-nilai moderasi seperti toleransi dan cinta tanah air dapat memperkuat keimanan dan kesadaran kebangsaan siswa. Pendidikan Islam yang berlandaskan nilai-nilai moderasi beragama sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik. Sementara itu penelitian kami berjudul “Implikasi Pendidikan

Islam Menurut SKB 3 Menteri dalam Menumbuhkan Karakter Moderat” menganalisis kebijakan SKB 3 Menteri dalam membentuk karakter moderat. Artikel ini mengevaluasi implimentasi kebijakan dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan yang moderat. Kedua artikel ini memiliki focus dan pendekatan yang berbeda akan tetapi saling melengkapi dalam menjelaskan pentingnya Pendidikan Islam moderat (Ulfa&Farih, 2025).

Artikel “Islam Moderat di Pesantren: Sistem Pendidikan, Tantangan, dan Prospeknya”, ditulis oleh Ajibah Quroti Aini, mengkaji peran pesantren dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggali system Pendidikan pesantren yang membentuk karakter santri yang moderat dan menyoroti tantangan yang dihadapi seperti modernisasi. Sementara artikel penelitian kami berjudul “Implikasi Pendidikan Islam Menurut SKB 3 Menteri dalam Menumbuhkan Karakter Moderat”, membahas dampak kebijakan SKB 3 Menteri terhadap Pendidikan Islam di Indonesia dan bagaimana kebijakan tersebut bisa menumbuhkan karakter moderat. Artikel pertama memberikan gambaran tentang prkatik Pendidikan Islam moderat di pesantren, sementara artikel kedua menyoroti kebijakan pemerintah dalam mendukung Pendidikan Islam moderat di lembaga Pendidikan (Aini, 2018).

Perbedaan novelty atau gap antar penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu mengenai persoalan toleransi antar umat beragama di lingkungan pendidikan. Artikel tersebut membahas mengenai SKB 3 menteri yang diterbitkan sebagai oleh pemerintah dalam mewujudkan sikap toleransi antar umat beragama. Sedangkan artikel ini berfokus pada dampak dari SKB 3 menteri terhadap pendidikan terutama karakter moderat peserta didik dalam pendidikan agama islam (Iqbal, 2021).

Urgensi penelitian ini berfokus pada pendidikan karakter moderat yang sangat berperan dalam membentuk akhlak dan sikap dari peserta didik implementasi pendidikan karakter moderat yang diterapkan melalui sekolah atau madrasah yang mengajarkan kepada peserta didik untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh karena itu penelitian ini penting dalam kaji bagaimana implikasi kebijakan SKB 3 menteri terhadap perkembangan pendidikan karakter moderat dalam pendidikan Islam (Fauzi Imam, Gozali, Aan Hasanah, n.d.).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan utama penelitian, yaitu untuk memahami secara mendalam berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan Islam, khususnya SKB 3 Menteri, serta relevansinya dalam menumbuhkan karakter moderat pada

peserta didik. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami isi kebijakan, nilai-nilai pendidikan, serta implikasinya terhadap praktik pendidikan Islam di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dengan memeriksa dokumen resmi, buku, jurnal, dan artikel terkait untuk mendapatkan gambaran penggunaan nilai-nilai moderat dalam lingkungan pendidikan. Penelusuran dilakukan terhadap bahan-bahan pustaka yang tersedia dalam bentuk cetak maupun digital, melalui perpustakaan, jurnal akademik, serta situs resmi lembaga pemerintahan dan pendidikan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber primer, yang mencakup dokumen resmi seperti SKB Tiga Menteri, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Agama, serta karya ilmiah yang secara langsung membahas moderasi beragama dalam pendidikan Islam. Selain itu, juga termasuk buku-buku dan artikel jurnal yang menjadi rujukan utama dalam menjelaskan nilai-nilai moderasi dan kebijakan pendidikan Islam.
2. Sumber sekunder, yaitu referensi pendukung yang menjelaskan, mengomentari, atau mengulas kembali isi dari sumber primer. Contohnya adalah buku teks pendidikan Islam, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta kebijakan publik yang membahas implikasi dari SKB Tiga Menteri secara lebih luas.

Seluruh data yang dikumpulkan dianalisis dengan mengidentifikasi, menginterpretasi, dan mengkaji tema-tema utama yang berkaitan dengan pendidikan Islam, nilai moderasi, dan peran kebijakan negara. Hasil analisis ini digunakan untuk menyusun pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana SKB Tiga Menteri berperan dalam memperkuat karakter moderat dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendidikan Islam Menurut SKB 3 Menteri

Dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri Tahun 1975, Bagian I Pasal I menegaskan bahwa madrasah berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang utamanya berfokus pada pendidikan agama Islam, yang merupakan sekurang-kurangnya 30% dari keseluruhan kurikulum di samping mata pelajaran umum lainnya. Rincian ini menegaskan kembali apa yang digariskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1946, Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1950, dan SKB Tahun 1975, yang menegaskan bahwa madrasah menyelenggarakan pendidikan umum dengan mengutamakan ajaran agama Islam sebagai unsur pokoknya. Struktur kurikulumnya dirancang untuk menyatukan pendekatan pendidikan umum dengan tradisi pendidikan pesantren. Dalam artikel mengenai madrasah yang tercantum dalam Ensiklopedia

Indonesia, madrasah dipandang sebagai bentuk integrasi antara pendidikan pondok pesantren yang berfokus pada ajaran Islam dan sistem pendidikan formal yang mencakup ilmu pengetahuan umum. (Haidar Putra Daulay, 2009)

Sejak awal berdirinya di Indonesia, madrasah telah menunjukkan ciri-ciri unik yang membedakannya dari pesantren dan lembaga pendidikan reguler, khususnya tujuan mereka untuk memadukan pendidikan agama dengan mata pelajaran sekuler. Seperti disebutkan sebelumnya, tidak ada pendekatan yang sepenuhnya konsisten terhadap proses pencampuran ini. Meskipun demikian, madrasah tetap diakui sebagai lembaga pendidikan Islam yang mengutamakan studi agama, meskipun metode untuk memadukannya dengan studi umum berbeda. Pelajaran yang dianggap utama atau inti adalah pelajaran yang menjadi penentu dalam evaluasi siswa, seperti saat penilaian akhir atau ujian kelulusan.

Secara historis, madrasah telah mengalami berbagai transformasi. Pada awal kemunculannya, madrasah hanya mengajarkan pelajaran-pelajaran keagamaan. Namun seiring perkembangan zaman, madrasah mulai mengakomodasi pelajaran umum ke dalam kurikulumnya. Pada tahap ini, pelajaran umum masih dianggap sebagai pelengkap oleh sebagian besar madrasah. Perubahan signifikan terjadi setelah diterbitkannya SKB Tiga Menteri pada tahun 1975. Sejak saat itu, porsi pelajaran umum dalam madrasah menjadi lebih besar, mencapai sekitar 70%, meskipun pelajaran agama tetap memiliki posisi yang sangat penting. Hal ini tercermin dalam Kurikulum Madrasah Aliyah tahun 1984 yang menempatkan pelajaran agama dalam kelompok program inti. Salah satu perubahan besar dalam pendidikan Islam terjadi dengan diberlakukannya SKB Tiga Menteri 1975, yang menjadi titik awal pembaruan dan penguatan peran madrasah dalam sistem pendidikan nasional (Haidar Putra Daulay d. N., 2016).

Terbitnya SKB Tiga Menteri tersebut menandai dimulainya babak baru bagi madrasah, khususnya yang menyelaraskannya dengan sekolah negeri. Madrasah yang tercakup dalam SKB ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan standar pendidikan di lingkungan madrasah. Salah satu dampak utama dari inisiatif ini adalah ijazah madrasah akan dianggap setara dengan ijazah dari sekolah negeri, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 Bab II SKB Tiga Menteri tersebut. Secara garis besar, esensi dari SKB Tiga Menteri mencakup tiga hal utama:

1. Ijazah yang dikeluarkan oleh madrasah memiliki kedudukan yang setara dengan ijazah sekolah umum pada jenjang yang sama.

2. Lulusan madrasah dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah umum yang lebih tinggi.
3. Siswa madrasah memiliki hak untuk berpindah ke sekolah umum yang setingkat.

Sebelum adanya SKB Tiga Menteri tahun 1975, terdapat kesenjangan yang cukup mencolok antara lulusan madrasah dan lulusan sekolah negeri, khususnya terkait peluang untuk mengenyam pendidikan tinggi. Mereka yang menamatkan program madrasah tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi negeri dan hanya dapat menempuh pendidikan di sekolah agama seperti IAIN atau perguruan tinggi Islam swasta. Namun, setelah diberlakukannya kebijakan ini, para lulusan madrasah memperoleh hak yang sama untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri. Misalnya, lulusan Madrasah Aliyah yang mengambil jurusan Fisika dan Biologi dapat menempuh pendidikan di bidang Kedokteran, Pertanian, Teknik, dan MIPA, sedangkan lulusan dari kelompok Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya dapat menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.. (Fuja Sabella, 2022).

Kesempatan untuk melanjutkan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Menurut Josep D. Farrell, salah satu tantangan besar yang dihadapi negara-negara berkembang dalam bidang pendidikan adalah kurangnya pemerataan akses untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak anak di negara-negara tersebut yang tidak dapat melanjutkan pendidikan, bahkan sebagian besar terpaksa putus sekolah.

Perbedaan kedua yang mencolok berkaitan dengan peluang kerja. Sebelum diberlakukannya SKB Tiga Menteri, lulusan madrasah hanya memiliki akses kerja yang terbatas, biasanya hanya dalam lingkup Departemen Agama atau lembaga keagamaan. Namun, setelah terbitnya SKB Tiga Menteri, peluang kerja bagi lulusan madrasah menjadi lebih terbuka dan tidak lagi terbatas pada sektor keagamaan saja.

Dari sudut pandang yang berbeda, SKB Tiga Menteri tersebut dapat dilihat sebagai langkah untuk menghubungkan lulusan madrasah dengan sekolah negeri. Langkah ini penting untuk mengatasi kesenjangan pola pikir di kalangan generasi penerus Indonesia. Jika ditelaah lebih mendalam, madrasah pasca-SKB Tiga Menteri tersebut pada hakikatnya dapat dipandang sebagai “Sekolah Negeri Plus”. Pada jenjang Sekolah Dasar (Madrasah Ibtidaiyah), madrasah serupa dengan SD Plus; pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (Madrasah Tsanawiyah), madrasah sejajar dengan SMP Plus; dan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (Madrasah Aliyah), madrasah setara dengan SMA Plus. Istilah “plus” di sini mengacu pada dimasukkannya mata pelajaran studi Islam dan bahasa Arab, yang tidak secara khusus ditawarkan di sekolah negeri.

Kesesuaian antara SKB Tiga Menteri dengan prinsip pendidikan Islam terlihat dari upayanya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan, tetapi juga mencakup berbagai bidang ilmu lain yang bermanfaat bagi manusia dalam menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi. Melalui kebijakan ini, diupayakan penghapusan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum yang selama ini dirasakan. Dengan demikian, diharapkan dapat terbentuk cara pandang yang holistik terhadap ajaran Islam.

B. Karakter Moderat

Menurut Doni Koesoema, pendidikan karakter dapat dipahami sebagai suatu proses menyeluruh yang melibatkan hubungan individu dengan berbagai dimensi, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Proses ini bertujuan untuk membuat individu lebih siap dalam menghadapi berbagai peluang dan bertanggung jawab terhadap perkembangan pribadi serta kemajuan orang lain di sekitarnya. Pendidikan karakter melibatkan pengembangan karakter pada siswa dengan memadukan pengetahuan, fokus, kemampuan, dan perilaku. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan sekitar, dan negara, dengan aspirasi untuk membina pribadi yang utuh atau insan kamil.

Pendidikan karakter merupakan segala upaya yang dilakukan oleh guru untuk memengaruhi karakter peserta didik. Guru berperan penting dalam membentuk karakter tersebut dengan memberikan teladan yang baik kepada siswa. Teladan ini dapat ditunjukkan melalui perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, serta sikap guru dalam menunjukkan toleransi dan berbagi dalam berbagai hal. Pendekatan terhadap pendidikan karakter dipandang sebagai usaha yang disengaja dan terorganisasi, bukan kejadian yang acak. Akibatnya, pendidikan karakter dipandang sebagai upaya yang berdedikasi untuk memahami, mengembangkan, dan memelihara prinsip-prinsip moral, baik bagi individu maupun bagi masyarakat luas. (Khatimah, 2022).

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memainkan peran yang sangat penting dan memikul tanggung jawab besar dalam membentuk karakter peserta didik. Tugas mereka tidak hanya terbatas pada penyampaian materi pelajaran, tetapi juga mencakup penanaman nilai-nilai moderasi beragama. Harapannya, nilai-nilai tersebut dapat tercermin dalam sikap beragama, perilaku toleran, serta membantu membangun karakter religius dan rasa nasionalisme di kalangan peserta didik, yang akan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari (Suryadi, 2022).

Pendidikan Agama Islam dapat dianggap moderat jika menekankan keterbukaan dalam berpikir, keinginan yang kuat untuk belajar, orientasi pada tujuan, serta

keseimbangan. Dalam menerapkan nilai moderasi, guru dituntut untuk bersikap terbuka dan fleksibel. Mereka juga perlu menumbuhkan rasa kasih sayang dan selalu mengutamakan dialog dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat memahami materi dengan baik dan merasa antusias (Suryadi, 2022).

Sikap moderat terlihat dalam karakter peserta didik, yang ditunjukkan melalui penyebaran Islam dengan cara damai, penerimaan terhadap gaya hidup modern termasuk teknologi, serta penghormatan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Mereka juga memahami ajaran Islam secara rasional. Para peserta didik menggunakan ijtihad yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi dalam Al-Qur'an dan Hadist, terutama dalam konteks yang jelas dan tidak dapat diragukan. Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat nilai-nilai dasar yang perlu dikembangkan dalam proses pembelajaran agar sikap moderat tetap terjaga, yaitu: tasamuh (toleransi), keadilan, tawazun (keseimbangan), musawah (persamaan), tanawwu' (keragaman), dan i'tidal (tegak lurus) (Hermawan, 2020).

Berdasarkan teori pendidikan karakter yang relevan, seperti yang diungkapkan oleh Thomas Lickona, pendidikan karakter tidak hanya menekankan pada pengajaran nilai-nilai moral secara langsung, tetapi juga melalui pembiasaan dan contoh yang baik. Dalam hal ini, guru berperan penting sebagai agen pembentuk karakter siswa. Perilaku, cara berbicara, serta sikap toleransi dan empati yang ditunjukkan oleh guru berfungsi sebagai teladan konkret bagi siswa. Ini sejalan dengan konsep moral knowing, moral feeling, dan moral behavior yang ditekankan oleh Lickona, yang menunjukkan bahwa pendidikan karakter harus mencakup aspek kognitif (pengetahuan tentang nilai), afektif (penghayatan terhadap nilai), dan perilaku (implementasi nilai dalam kehidupan sehari-hari) (Lickona, 2001).

Dengan demikian, proses pendidikan karakter bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari upaya sadar dan terencana untuk menginternalisasi nilai-nilai etika secara holistik, baik untuk individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan karakter berfungsi sebagai sumber daya penting untuk mengembangkan generasi yang tidak hanya memiliki kemampuan intelektual, tetapi juga rasa etika yang kuat. (Sholeh, 2022).

Sikap ini menuntut keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan dan menghindari ekstremisme, baik ke arah yang terlalu liberal maupun terlalu konservatif. Keberadaan moderasi beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia yang kaya akan keragaman agama, suku, bahasa, dan wilayah. Keragaman ini merupakan bagian dari takdir Ilahi

yang harus diterima dan dijaga, agar kita dapat mencapai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa yang harmonis (Nadhrach, 2023).

C. Implikasi Pendidikan Islam Menurut SKB 3 Menteri dalam Menumbuhkan Karakter Moderat

Pendidikan Islam memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter peserta didik yang tidak hanya memahami ajaran agama secara mendalam, tetapi juga mampu bersikap moderat dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Moderasi dalam beragama mencerminkan sikap yang seimbang, terbuka, toleran, dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap perbedaan. Dalam konteks ini, SKB 3 Menteri yang melibatkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama menjadi pijakan penting dalam memperkuat pendidikan yang inklusif dan berwawasan kebangsaan, sekaligus mendorong pembentukan karakter moderat di lingkungan pendidikan, termasuk pendidikan Islam. (Sayid Ahmad Ramadhan, 2023)

1. Integrasi Nilai-Nilai Moderasi dalam Kurikulum Pendidikan Islam

SKB 3 Menteri mendorong satuan pendidikan untuk menginternalisasikan nilai-nilai moderasi dalam pembelajaran, terutama dalam Pendidikan Agama Islam (PAI). Kurikulum diarahkan agar peserta didik memahami ajaran Islam secara kontekstual, tidak hanya secara tekstual. Ini meliputi penguatan nilai toleransi (tasamuh), keseimbangan (tawazun), dan keadilan ('adl) dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik diajak untuk hidup harmonis dalam keberagaman dan menjauhi sikap ekstrem dan fanatisme dalam beragama.

2. Peningkatan Kompetensi Guru sebagai Agen Moderasi

Salah satu implikasi penting SKB 3 Menteri adalah pentingnya meningkatkan kapasitas guru, khususnya guru PAI, agar mampu menjadi teladan dalam bersikap moderat. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga pembimbing sikap dan kepribadian. Mereka perlu memahami dan mengajarkan nilai-nilai Islam yang damai dan toleran, serta memiliki keterampilan untuk mengelola keberagaman peserta didik secara bijaksana.

3. Penguatan Pendidikan Islam yang Ramah dan Inklusif

Pendidikan Islam diarahkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, ramah, dan terbuka terhadap berbagai perbedaan latar belakang agama, budaya, dan sosial. Implementasi SKB 3 Menteri menuntut madrasah dan sekolah-sekolah Islam untuk menjadi contoh praktik pendidikan yang bebas diskriminasi dan kekerasan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal.

4. Penanaman Sikap Dialogis dan Anti-Kekerasan

Karakter moderat terbentuk dari kebiasaan berdialog dan bermusyawarah dalam menyelesaikan perbedaan dan konflik. Melalui pendekatan pendidikan Islam yang moderat, peserta didik dilatih untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang damai dan menghargai pandangan orang lain. Hal ini sesuai dengan semangat SKB 3 Menteri yang menekankan pentingnya membangun iklim sekolah yang harmonis dan demokratis.

5. Pencegahan Radikalisme melalui Pendidikan Islam

Salah satu fungsi strategis pendidikan Islam dalam kerangka SKB 3 Menteri adalah menjadi benteng terhadap paham radikal dan intoleran. Pendidikan Islam yang mengedepankan moderasi akan membentuk peserta didik yang kritis terhadap ideologi kekerasan, sekaligus memiliki ketahanan moral dan spiritual dalam menghadapi narasi yang menyesatkan atas nama agama.

6. Kesiapan Menghadapi Tantangan Global

Di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi, generasi muda muslim diharapkan mampu menjaga identitas keagamaannya tanpa terjebak dalam eksklusivisme. Pendidikan Islam yang moderat mempersiapkan mereka menjadi pribadi yang terbuka, bijaksana, dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat global yang majemuk. (Delia Kartika, Nicken Dosi Utama, Nymas Endah Putri, 2024)

Pendidikan Islam berperan strategis dalam membentuk kepribadian bangsa, terutama dalam menanamkan sikap beragama secara moderat. Moderasi mencerminkan sikap adil, seimbang, dan terbuka terhadap keberagaman, serta menolak segala bentuk radikalisme. Dalam konteks kehidupan yang beragam, sikap moderat penting untuk menjaga keharmonisan antar kelompok. Melalui proses pendidikan, peserta didik diajak untuk menghargai perbedaan, membangun dialog, dan menyelesaikan perbedaan secara damai. Moderasi menjadi cerminan dari ajaran Islam yang membawa rahmat bagi semesta (rahmatan lil-‘ālamīn). Prinsip “Khairunnās anfa‘uhum linnās”—yakni manusia terbaik adalah yang paling memberi manfaat bagi orang lain—menjadi landasan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan yang diwujudkan dalam tindakan nyata melalui pendidikan. Dengan demikian, pendidikan Islam membentuk generasi yang terbuka, damai, dan siap berkontribusi positif bagi masyarakat luas. (Arief, 2021)

KESIMPULAN

SKB Tiga Menteri tahun 1975 menjadi langkah penting dalam menggabungkan pendidikan umum dan agama di madrasah. Aturan ini menjadikan madrasah setara

dengan sekolah umum, baik dari segi kurikulum maupun peluang bagi lulusannya dalam melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. Madrasah tidak lagi sekadar lembaga pendidikan keagamaan, tetapi telah berkembang menjadi institusi pendidikan terpadu yang mengajarkan ilmu agama dan ilmu umum secara seimbang. Kebijakan ini sangat memengaruhi perkembangan kepribadian yang seimbang pada siswa. Pendidikan Islam bertujuan untuk menumbuhkan prinsip-prinsip seperti keadilan, penerimaan, keharmonisan, dan penghargaan terhadap latar belakang yang berbeda.

Peran guru, khususnya guru Pendidikan Agama Islam, menjadi sangat penting sebagai teladan dan pembimbing dalam membangun sikap yang moderat dan inklusif di kalangan siswa. Melalui pendekatan yang moderat, pendidikan Islam berfungsi membentuk generasi yang tidak hanya memahami ajaran agama, tetapi juga mampu hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang majemuk serta menghadapi tantangan zaman dengan bijaksana. Tujuan akhirnya adalah mencetak pribadi yang utuh dan bermanfaat bagi sesama, sebagaimana cita-cita pendidikan Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, H, and Afan Zaini. “*Urgensi Manajemen Pendidikan Islam Di Era Modern.*” Jurnal Ummul Qura 9, no. 1 (2015): 209–28.
- Aini, A. Q. (2018). Islam Moderat di Pesantren: Sistem Pendidikan, Tantangan, dan Prospeknya. *Edukasia Islamika*, 3(2), 218-233.
- Ajib Hermawan, “Nilai Moderasi Islam Dan Internalisasinya Di Sekolah,” *Insania Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* 25, no. 1 (2020): 31–43
- Alfarisi, S., & Bakar, Y. A. (2022). *SKB 3 Menteri dan Implikasinya pada Pendidikan Islam*. Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam, 8(1), 1-9.
- Ari Susandi Anwar Sholeh, Devy Habibi Muhammad, “*The Concept of Moral Education The Perspective of Alghazali And Thomas Lickona*” 9, no. 1 (2022): 356–63.
- Husnul Khatimah, I M Kartika, and I G N Santika, “*Pengaruh Implementasi Pendidikan Karakter Terhadap Sikap Sosial Pada Siswa,*” *Widya Accarya*13, no. 2 (2022): 127–32.

- Muaz, Muaz, and Uus Ruswandi. “*Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam.*” *JIIIP -Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*5, no. 8 (2022): 3194–3203.
- Nabila K A Nadhrah, Casram, and Wawan Hernawan, “*Moderasi Beragama Menurut Yusuf Al-Qardhawi, Quraish Shihab, Dan Salman Al-Farisi,*” *Living Islam Journal of Islamic Discourses* 6, no. 1 (2023)
- Suryadi, Rudi Ahmad. “*Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Agama Islam.*” *Taklim : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 20, no. 1 (2022): 1–12.
- Rudi Ahmad Suryadi, “*Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Agama Islam,*” *Taklim : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 20, no. 1 (2022): 1–12.
- Thomas Lickona, “*What Is Effective Character Education?,*” Paper Presented at The Stony Brook School Symposium on Character, no. 1985 (2001): 1–12.
- Ulfa, F. M., & Farih, M. (2025). *PENDIDIKAN ISLAM MODERAT DALAM MENUMBUHKAN KARAKTER RELIGIUS DAN KEBANGSAAN DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.* *Jurnal Al-Fatih*, 8(1), 54-78.
- Haidar Putra Daulay , d. N. (2016). *Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah.* Jakarta: Prenada Media Grup.
- Fuja Sabella, A. M. (2022). *IMPLIKASI SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) TIGA MENTERI 1974 TERHADAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA.* *At-Tabayyun.*
- Haidar Putra Daulay. (2009). *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di indonesia.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, A. (2021). *KONSTRUKSI MODERASI BERAGAMA Catatan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.* PPIM UIN Jakarta.
- Delia Kartika, Nicken Dosi Utama, Nymas Endah Putri, P. A. (2024). *NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM BUKU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI DALAM MEMBENTUK SIKAP MODERAT SISWA DI*

SMA N 3 REJANG LEBONG. *Literasi Kita Indonesia, Volume 5 N.*

Fauzi Imam, Gozali, Aan Hasanah, B. S. A. (n.d.). Implikasi dan Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pengembangan Bidang Pendidikan Islam. *Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.13 No.*

Sayid Ahmad Ramadhan, Z. H. (2023). ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DAN IMPLIKASINYA BAGI MADRASAH DULU-SEKARANG. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kearifan Lokal (JIPKL), Vol. 3 No., Hal. 194-205.*